

OMBUDSMAN DORONG PENGUATAN PENGAWASAN MBG DI BANGKA BELITUNG USAI KASUS KERACUNAN

Sabtu, 05 September 2026 - kepbabel

PANGKALPINANG - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis, 3 September 2026, di Gedung Nata Praja BKPSDMD. Kegiatan dihadiri 42 peserta perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah di provinsi ini serta narasumber dari sejumlah dinas teknis terkait.

Lintas instansi bahas standar gizi, keamanan pangan, dan pengelolaan limbah

Rapat tersebut menghadirkan pemateri dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. Turut hadir pula Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bangka Belitung.

Agenda rapat difokuskan pada beberapa aspek pelaksanaan MBG, antara lain:

- pemenuhan standar gizi dan keamanan pangan;
- kualitas bahan pangan, proses pengolahan, dan distribusi makanan;
- pengelolaan lingkungan dan limbah makanan;
- tata kelola serta pelayanan kepada penerima manfaat.

Menurut siaran pers resmi Ombudsman RI, kegiatan ini dirancang sebagai titik temu strategis antara Ombudsman dan instansi pengawas agar langkah pengawasan dapat tersinergi dan mencegah berulangnya insiden yang merugikan penerima manfaat.

"Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ombudsman menyoroti secara serius tata kelola SPPG di Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya, masih ditemukan sejumlah kasus keracunan dan ditemukannya benda asing pada makanan dalam pelaksanaan di lapangan yang menunjukkan perlunya penguatan tata kelola, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi,"

Kalimat di atas disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, yang hadir memimpin rapat. Pernyataan itu menunjukkan fokus pengawas terhadap aspek keselamatan dan kualitas layanan MBG yang menyentuh kelompok rentan, termasuk anak sekolah dan keluarga kurang mampu.

Dampak lokal dan kebutuhan penguatan

Program MBG merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi bagi penerima manfaat. Namun, adanya laporan insiden seperti keracunan dan ditemukannya benda asing pada makanan menimbulkan

kekhawatiran publik serta menuntut perbaikan manajemen mulai dari pengadaan bahan, proses produksi, hingga distribusi dan pengelolaan limbah.

Ombudsman menekankan pentingnya penguatan tata kelola SPPG agar program MBG tidak sekadar memenuhi kuantitas tetapi juga kualitas dan aman bagi penerima. Pembahasan di rapat meliputi mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi antarinstansi serta peran BPOM, Dinas Kesehatan, dan instansi lainnya dalam memastikan standar dipatuhi.

Data peserta dan instansi terkait

Peserta 42 perwakilan SPPG se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lokasi Gedung Nata Praja BKPSDMD, Pangkalpinang

Tanggal 3 September 2026

Instansi pemateri BPOM Babel, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kepala Regional SPPG

Upaya yang diharapkan pasca-rapat

Dalam siaran pers, Ombudsman menyampaikan bahwa rapat diharapkan menjadi ruang diskusi untuk bertukar gagasan serta menyelaraskan langkah lintas instansi. Tujuannya ialah meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya program MBG agar kejadian kritis tidak terulang.

Beberapa langkah yang menjadi perhatian bersama meliputi peningkatan pengawasan mutu bahan pangan, penerapan standar sanitasi dan proses pengolahan, prosedur pengambilan sampel dan pelaporan insiden, serta pengelolaan limbah makanan untuk mencegah kontaminasi lingkungan.

Bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat program MBG, penguatan pengawasan diharapkan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap program. Sementara bagi pelaksana di lapangan, koordinasi lintas instansi diharapkan memberikan pedoman teknis yang lebih jelas dan mekanisme penanganan insiden yang cepat.

Ombudsman juga menekankan pentingnya transparansi informasi kepada publik terkait hasil pengawasan dan tindak lanjut atas temuan di lapangan agar masyarakat dapat mengetahui langkah perbaikan yang diambil oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya pengawasan berkelanjutan terhadap program MBG di Kepulauan Bangka Belitung yang berpotensi mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan sejumlah kelompok rentan di provinsi kepulauan tersebut.